

PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DISABILITAS DI KOTA BALIKPAPAN

Tri Puji Arianti¹

Abstrak

Disabilitas di Kota Balikpapan belum sejahtera terbukti dari jumlah disabilitas di Kota Balikpapan 1547 dan yang mendapatkan bantuan hanya 48 Disabilitas. Dalam meningkatkan kesejahteraan Disabilitas di Kota Balikpapan mencangkup empat aspek yaitu aksesibilitas, kesamaan kesempatan, reabilitas dan bantuan sosial. Rumusan Masalah berdasarkan latar belakang dalam penelian ini adalah Bagaimana Peran Dinas dalam meningkatkan kesejahteraan Disabilitas di Kota Balikpapan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana peran Dinas Sosial Kota Balikpapan dalam meningkatkan kesejahteraan Disabilitas. Penelitian ini menggunakan teori Pembangunan Manusia yang dikemukakan oleh Alexander (1994) yang terdiri dari Arah Pengembangan Konsep Pembangunan Manusia serta Pemberdayaan Masyarakat. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan Disabilitas di Kota Balikpapan terkait kesejahteraan sosial Disabilitas terdapat ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan yang meliputi aksesibilitas, kesamaan kesempatan, rehabilitasi dan bantuan sosial. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimana peneliti memaparkan dan menjelaskan data yang diperoleh dari temuan-temuan dilapangan yang diperoleh dari beberapa informan melalui kata-kata atau kalimat. Dari hasil analisis data menurut informan dan penemuan di lapangan dapat disimpulkan mengenai beberapa masalah yang dihadapi Dinas Sosial saat ini meliputi belum menyediakan infrastruktur yang memadai dan belum dapat memudahkan akses pelayanan serta terbatasnya anggaran yang ada. Penyandang Disabilitas menghadapi persoalan yang berkenaan dengan kesejahteraan mereka, dilihat dari masih sulitnya aksesibilitas dalam memperoleh kesempatan yang sama dan ketersediaan fasilitas khusus bagi penyandang Disabilitas yang masih terbilang minim serta belum tersedianya rehabilitas yang memadai yang menjamin pelayanan kesehatan para penyandang Disabilitas.

Kata kunci: Kesejahteraan, Disabilitas, Dinas Sosial.

Pendahuluan

Program pembangunan nasional harus dilakukan secara *sistematis, rasional, efektif* dan *efisien* yang sasaran utamanya untuk mewujudkan

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: triarianti@gmail.com

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat atau manusia Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan sosial merupakan salah satu bentuk pendekatan pembangunan secara nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan kehidupan manusia yang dilandasi adanya rasa keadilan, kedamaian, dan terwujudnya kesejahteraan yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, kebutuhan rohani, dan kebutuhan sosial. Pembangunan sosial dapat dilakukan secara *individual* atau perseorangan ataupun secara *kolektif* atau kelompok. Pembangunan sosial juga merupakan suatu proses yang mengangkat hubungan kekuasaan-kekuasaan yang berubah menjadi hubungan pemberdayaan antara individu, kelompok dan lembaga-lembaga sosialnya.

Usaha pelaksanaan pembangunan dalam rangka memenuhi taraf kesejahteraan sosial perlu dikembangkan karena sebagian besar rakyat Indonesia belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diharapkan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama seluruh elemen bangsa untuk pemenuhan kesejahteraan sosial menjadi isu secara Nasional.

Untuk meningkatkan pembangunan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus memperhatikan kondisi sumber daya manusia yang ada dan memperhatikan aspek yang dapat menghambat perkembangan dalam pembangunan, diantaranya dengan memperhatikan kesejahteraan bagi Disabilitas. Karena ini dapat menghambat pertumbuhan dan percepatan pembangunan yang ada di Indonesia. Untuk itu perlu adanya penanganan pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial guna meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan bantuan secara langsung setiap bulan ataupun dengan cara memberikan pelatihan dan kursus untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi Disabilitas.

Penyandang cacat atau lebih dikenal dengan istilah *Disabilitas* hampir terdapat di seluruh wilayah Indonesia bahkan di seluruh dunia. Jumlah penyandang cacat ini lebih besar dan senantiasa bertambah setiap tahunnya. Hal ini dapat disebabkan karena kecacatan pada saat lahir, kecacatan akibat kecelakaan lalu lintas ataupun kecelakaan pada saat bekerja. Variasi tersebut menyebabkan perbedaan keadaan sosial, ekonomi yang menyangkut kesejahteraan masyarakat Disabilitas dan sarana prasarana yang disediakan oleh Pemerintah.

Keadaan ini mencerminkan kondisi kehidupan masyarakat pada umumnya dan kebijaksanaan sosial ekonomi dari tahun ke tahun, akan tetapi dalam bidang kecacatan terdapat pula keadaan-keadaan khusus yang telah mempengaruhi kondisi kehidupan para penyandang cacat. Kurangnya perhatian dari pemerintah serta rasa takut merupakan faktor-faktor sosial yang dalam sepanjang sejarah kecacatan telah mengucilkan para penyandang cacat dan menghambat perkembangannya.

Selama beberapa tahun silam, kebijaksanaan berkembang dari perawatan dasar di lembaga-lembaga kependidikan bagi anak-anak yang menyandang

kecacatan sampai pada *rehabilitasi* bagi orang-orang yang mengalami kecacatan pada masa dewasanya. Kondisi saat ini dapat dilihat seperti pada tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel Daftar Disabilitas yang sudah mendapatkan Keterampilan Rehabilitasi dan Bantuan Sosial di Kota Balikpapan

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Peserta	Jenis Disabilitas
1.	Keterampilan Membatik	15 orang	Tuna Daksa
2.	Keterampilan Memijat Shiatsu	15 orang	Tuna Netra
3.	Program Rehabilitasi	3 orang	Tuna Netra
4.	Bantuan Dana	15 orang	Tuna Daksa
Jumlah Total Peserta		48 orang	

Sumber: Kantor Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2016-2017

Dari tabel diatas menyajikan kondisi kesejahteraan kehidupan Disabilitas di Kota Balikpapan selama ini belum bisa dikatakan sejahtera. Dari data yang ada saat ini pada Dinas Sosial Kota Balikpapan, pada tahun 2016 sampai tahun 2017 terdapat 48 orang yang sudah mendapatkan bantuan keterampilan maupun rehabilitasi yang mencakup : *aksesibilitas*, kesamaan kesempatan, *rehabilitasi* dan pemberian bantuan sosial yang terdiri dari 30 orang mendapat pelatihan keterampilan membatik dan memijat shiatsu, 3 orang program rehabilitasi dan 15 orang mendapatkan dana bantuan dana.

Jadi jumlah keseluruhan Disabilitas yang sudah mendapatkan bantuan berupa keterampilan rehabilitasi, dan bantuan dana guna meningkatkan kesejahteraan ada 48 orang dari jumlah keseluruhan Disabilitas 1547 orang atau sekitar 0,03%.

Melihat kondisi diatas, perlu penanganan yang serius dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan Disabilitas, baik melalui bantuan tunai langsung maupun melalui pendidikan dan pelatihan sehingga dapat membuka peluang usaha sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan penyandang Disabilitas.

Kehidupan Disabilitas di Kota Balikpapan sebelum mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial masih memprihatinkan. Hal ini disebabkan penyandang Disabilitas tidak bekerja dan belum bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena keterbatasan fisik dan tidak ada penghasilan tetap yang didapatkannya, sehingga sulit memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebelum mendapatkan bantuan dana maupun akses keterampilan dan pendidikan yang diberikan kepada Disabilitas, kehidupan penyandang Disabilitas masih mengharapakan kepada keluarga maupun tetangga yang ada disekitarnya.

Untuk itu perlu penanganan yang serius dari Pemerintah melalui Dinas Sosial dalam memberikan fasilitas berupa : aksesibilitas, kesamaan kesempatan, reabilitasi dan bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan Disabilitas.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan di atas, peneliti berkeinginan untuk menjadikan sebuah judul penelitian terutama pada kesejahteraan Disabilitas khususnya yang belum mendapatkan keterampilan dan masih berusia produktif dengan judul : **“Peran Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Disabilitas di Kota Balikpapan”**.

Kerangka Dasar Teori

Pembangunan Manusia

Pembangunan secara umumnya pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya (Alexander, 1994). Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk, melalui upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar berpartisipasi dalam segala bidang pembangunan. Pembangunan manusia lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan dan produksi komoditas serta akumulasi modal.

Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi sebagaimana dijelaskan Edi Suharto (2009: 102) yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Dalam upaya pemberdayaan ini, upaya yang sangat pokok adalah meningkatkan taraf pendidikan dan derajat kesehatan dan akses ke dalam sumber kemajuan ekonomi seperti memberikan rehabilitasi serta dana kepada Disabilitas.
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi dalam proses pemberdayaan sehingga yang lemah tidak boleh menjadi bertambah lemah karena kekurangan berdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Peran Dinas Sosial

Poerwadarminta mengemukakan bahwa (1995:751) “Peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Bryant dan White dalam Amira (2012:9) menyatakan bahwa peran didefinisikan sebagai suatu deskripsi “Pekerjaan untuk seseorang atau individu yang mengandung harapan-harapan tertentu yang tidak mempedulikan siapa yang menduduki suatu posisi tersebut”.

Pengertian bahwa peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kedudukan (status) sebagai bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Sedangkan Dinas Sosial merupakan “Unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas dikoordinasikan oleh asisten sesuai pibidangnya”. (Sumber: Dinas Sosial Kota Balikpapan).

Dari pengertian tersebut bila dikaitkan dengan fungsi pemerintahan, maka definisi peran dinas sosial adalah organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dan fungsi - fungsi pemerintahan daerah ataupun di kota dalam hal ini adalah peran Dinas Sosial dalam pemenuhan kesejahteraan bagi Disabilitas di Kota Balikpapan.

Peran Dinas Sosial sebagai satuan kerja perangkat daerah, Dinas Sosial Kota Balikpapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Daerah. Peran atau upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial Kota Balikpapan antara lain :

1. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial :
 - a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial
2. Penyediaan sarana dan prasarana sosial :
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial
 - b. Penyediaan sarana pelayanan luar panti
3. Penanggulangan korban bencana :
 - a. Bantuan sosial bagi korban bencana
 - b. Evakuasi korban bencana
4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial.(Sumber: Dinas Sosial Kota Balikpapan)

Disabilitas

Disabilitas (*disability*) didefinisikan sebagai seseorang yang belum mampu berakomodasi dengan lingkungan sekitarnya sehingga menyebabkan Disabilitas.

Disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi Disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal.

Pada Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2016 menegaskan bahwa difabel merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Mereka juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pada Pasal 18 tentang Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- 1) mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik
- 2) mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu

Pada pasal 10 Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- 1) mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus
- 2) mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan
- 3) mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan
- 4) mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012). Todaro dan Stephen C. Smith (2006), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan *distribusi* kebutuhan dasar seperti makanan, rumah, kesehatan dan perlindungan. Kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial, individu dan bangsa.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi

dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Deskriptif Kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan peneliti, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aksesibilitas
2. Kesamaan kesempatan
3. Rehabilitasi
4. Bantuan Sosial

Hasil Penelitian

Menyiapkan Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan kemudahan yang dicapai oleh Disabilitas terhadap suatu objek pelayanan ataupun lingkungan. Kemudahan tersebut diimplementasikan kepada ketersediaan akses penterjemah bahasa isyarat, bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum lainnya. Melalui pemberian pelayanan fasilitas khusus Disabilitas, aksesibilitas difokuskan pada kemudahan bagi Disabilitas untuk menggunakan fasilitas seperti Dinas Sosial menyediakan penterjemah bahasa isyarat bagi Disabilitas, dalam hal fasilitas sarana Dinas Sosial dapat menyediakan penggunaan kursi roda ataupun tongkat agar bisa berjalan dengan mudah.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari beberapa informan yang bekerja pada Dinas Sosial Kota Balikpapan menjelaskan bahwa Dinas Sosial selalu mengutamakan penyandang Disabilitas dalam pelayanan tetapi belum menyediakan aksesibilitas yang memadai dikarenakan kondisi kantor Dinas Sosial yang belum mempunyai sarana dan prasarana khusus untuk penyandang Disabilitas serta kantor Dinas Sosial sendiri bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetapi Dinas Sosial memberikan fasilitas infrastruktur khusus untuk penyandang Disabilitas berupa LBK (Loka Bina Karya) untuk mempermudah aksesnya dalam berkarya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari beberapa informan penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa Penyandang Disabilitas belum mendapatkan pelayanan yang memadai khususnya aksesibilitas pada infrastruktur yang ada di kantor Dinas Sosial, karena tidak tersedianya sarana lift serta alat penunjang yang disediakan oleh Dinas Sosial. Harapannya para penyandang

Disabilitas pemerintah membantu dan memperhatikan aksesibilitas untuk penyandang Disabilitas agar memudahkan dalam melakukan pelayanan maupun yang lainnya.

Dari tanggapan atau hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan mengenai beberapa masalah yang dihadapi Dinas Sosial saat ini meliputi belum tersedianya infrastruktur yang memadai dan belum dapat memudahkan para penyandang Disabilitas untuk mengakses pelayanan langsung di kantor Dinas Sosial. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial belum memiliki fasilitas seperti belum tersedianya alat-alat penunjang yang meliputi kursi roda dan tongkat untuk berjalan khususnya bagi para penyandang tuna daksa dan tuna netra. Selain alat penunjang, Dinas Sosial juga membutuhkan sarana lift sebagai pengganti tangga untuk memudahkan pelayanan khususnya bagi para penyandang Disabilitas.

Memberikan Kesamaan Kesempatan

Kesamaan Kesempatan merupakan keadaan memberikan peluang kepada Disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Dinas Sosial harus melakukan pendataan ke setiap Disabilitas. Setelah melakukan pendataan pihak instansi terkait melaksanakan program-program dengan memberikan pelatihan keterampilan bagi para disabilitas untuk mempunyai keahlian agar dapat meningkatkan usaha ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari beberapa informan yang bekerja pada Dinas Sosial Kota Balikpapan menjelaskan bahwa dalam kesamaan kesempatan Dinas Sosial memberikan program pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang Disabilitas. Dinas Sosial sudah memberikan pelatihan keterampilan yang berbeda dan hanya menyediakan 15 orang setiap tahunnya karena disesuaikan dengan anggaran yang ada. Pelatihan keterampilan yang diberikan seperti pelatihan membatik, memijat, service dan lain sebagainya sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Dinas Sosial dalam memberikan pelatihan keterampilan juga mendatangkan instruktur yang sudah memiliki sertifikasi yang resmi sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Setelah pasca pelatihan Dinas Sosial memberikan alat-alat sesuai dengan pelatihan yang diikuti, selain itu Dinas Sosial juga mempromosikan kepada instansi-instansi yang ada di Kota Balikpapan untuk memperkerjakan penyandang Disabilitas yang sudah memiliki keahlian dan mampu untuk melanjutkan keahlian yang sudah mereka dapatkan dari pelatihan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari beberapa informan penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang Disabilitas sudah mendapatkan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat guna meningkatkan kesejahteraan. Penyandang Disabilitas yang sudah mendapatkan pelatihan keterampilan setelah selesai mengikuti pelatihan para penyandang ada

yang membuka peluang usaha sendiri maupun berkerja pada instansi lain serta bisa mendapatkan penghasilan sendiri dari keahlian yang dimiliki.

Dari tanggapan atau hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan mengenai kesamaan kesempatan dalam memberikan pelatihan keterampilan Dinas Sosial memberikan batasan jumlah bantuan bagi para penyandang Disabilitas seperti adanya keterbatasan jumlah orang yang akan diberikan bantuan khususnya dalam hal pelatihan keterampilan yang tidak sebanding dengan jumlah para penyandang Disabilitas yang sebenarnya. Hal ini terkait karena kurangnya anggaran dan kelengkapan data mengenai jumlah para penyandang Disabilitas serta kurangnya perhatian dari pihak pemerintah dan pihak yang terkait mengenai jumlah para penyandang Disabilitas.

Memberikan Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penyandang yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis dan sosial yang maksimal. Pemerintah harus menjamin layanan kesehatan penyandang Disabilitas melalui PBI (Penerima Bantuan Iuran) dengan cara memberikan kartu berobat secara gratis seperti KIS maupun BPJS, melalui rehabilitasi ini penyandang Disabilitas tidak perlu khawatir jika sakit.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari beberapa informan yang bekerja pada Dinas Sosial Kota Balikpapan menjelaskan bahwa dalam rehabilitasi melalui pemberian jaminan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Dinas Sosial yaitu PBI (Penerima Bantuan Iuran) berupa BPJS diharapkan dapat membantu penyandang Disabilitas dalam bidang kesehatan, walaupun belum tercover atau terlayani semuanya. Akan tetapi Dinas Sosial bisa memberikan pelayanan berupa kesehatan kepada Disabilitas hanya kepada penyandang Disabilitas yang tidak memiliki tempat tinggal dan tidak mampu. Dinas Sosial mengharapkan semua penyandang Disabilitas tercover semua dan bisa dimasukan di PBI semua. Dinas Sosial juga memberikan program khusus untuk Disabilitas yaitu berupa material serta spiritual maupun alat penunjang Disabilitas agar secara psikologis penyandang Disabilitas bisa mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari beberapa informan Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang Disabilitas sudah mendapatkan jaminan kesehatan tetapi belum merata. Penyandang Disabilitas mengharapkan pemberian jaminan kesehatan yang diberikan oleh Dinas Sosial diberikan secara rata, Penyandang Disabilitas juga mendapatkan peran psikologis dari Dinas Sosial melalui pemberian bantuan berupa material maupun spiritual serta bimbingan untuk menjadikan penyandang lebih mandiri atau percaya diri khususnya bagi penyandang Disabilitas berat.

Dari tanggapan atau hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan mengenai rehabilitasi dalam memberikan jaminan kesehatan dengan cara memberikan kartu berobat gratis melalui program PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang diberikan pada penyandang yang tidak mempunyai jaminan kesehatan serta tidak mampu atau miskin, sehingga berhak mendapatkan jaminan kesehatan tersebut. Tetapi pemberian jaminan kesehatan ini belum tercover semua dan belum merata yang mendapatkan jaminan kesehatan ini. Secara psikologis Dinas Sosial juga memberikan program secara materil maupun spriritual serta memberikan alat penunjang untuk membantu menjadikan Disabilitas mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat.

Memberikan Bantuan Sosial

Bantuan Sosial merupakan upaya pemberian bantuan kepada penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Pemerintah juga harus memberikan bantuan dana kepada Disabilitas setiap bulan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari beberapa informan yang bekerja pada Dinas Sosial Kota Balikpapan menjelaskan bahwa dalam Bantuan Sosial melalui pemberian dana yang berasal dari pusat maupun provinsi serta pemberian sembako berasal dari kota yang diprioritaskan untuk penyandang Disabilitas berat diharapkan dapat memanfaatkan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari beberapa informan Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa dalam Bantuan Sosial yang diberikan berupa dana maupun yang lainnya sangat membantu diharapkan para penyandang Disabilitas yang lain dapat tersentuh oleh Dinas Sosial, agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan penyandang Disabilitas.

Dari tanggapan atau hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan mengenai Bantuan Sosial yang diberikan kepada para Penyandang Disabilitas berupa dana asistensi dari pusat untuk 15 penyandang dan masing-masing mendapatkan Rp.300.000,-per orang setiap bulan serta bantuan terencana dari provinsi senilai Rp.1.000.000,- per orang yang diberikan setiap tahun serta bantuan sembako dari kota. Bantuan dana diprioritaskan hanya untuk penyandang Disabilitas berat.

Berdasarkan tanggapan atau hasil jawaban dari penelitian kepada beberapa informan maka dapat disimpulkan mengenai Pembangunan manusia dalam hal ini peran Dinas Sosial dalam melakukan pemberdayaan khususnya penyandang Disabilitas. Kesejahteraan bagi Disabilitas perlu mendapat perhatian yang dari pemerintah. Karena hal ini merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat kemajuan pembangunan yang akan dilaksanakan. Potensi penyandang Disabilitas

dikembangkan oleh Dinas Sosial agar berdaya dan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang Disabilitas.

Peran Dinas Sosial memberikan program-program dan bantuan seperti mengutamakan penyandang Disabilitas dalam melakukan pelayanan, memberikan pelatihan keterampilan agar dapat meningkatkan usaha ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan Disabilitas, rehabilitasi dalam memberikan jaminan kesehatan dalam bentuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan memberikan alat bantu berjalan dalam pemulihan keadaan agar secara psikologis penyandang Disabilitas bisa mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat serta bantuan sosial juga memberikan bantuan dalam bentuk dana dan sembako kepada penyandang Disabilitas tiap bulan secara berkelanjutan agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan.

Adapun beberapa masalah yang dihadapi Dinas Sosial saat ini meliputi belum tersedianya infrastruktur yang memadai dan belum dapat memudahkan para penyandang Disabilitas untuk mengakses pelayanan langsung di Kantor Dinas Sosial. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial belum memiliki fasilitas seperti belum tersedianya alat-alat penunjang yang meliputi kursi roda dan tongkat untuk berjalan khususnya bagi para penyandang tuna daksa dan tuna netra. Selain alat penunjang, Dinas Sosial juga membutuhkan sarana lift sebagai pengganti tangga untuk memudahkan pelayanan khususnya bagi para penyandang Disabilitas.

Selain belum tersedianya fasilitas yang memadai, Dinas Sosial juga memberikan batasan-batasan jumlah bantuan bagi para penyandang Disabilitas seperti adanya keterbatasan jumlah orang yang akan diberikan bantuan khususnya dalam hal pelatihan keterampilan yang tidak sebanding dengan jumlah para penyandang Disabilitas yang sebenarnya. Hal ini terkait karena kurangnya defisit anggaran dan kelengkapan data mengenai jumlah para penyandang Disabilitas serta kurangnya perhatian dari pihak pemerintah dan pihak yang terkait mengenai jumlah para penyandang.

Selain hal tersebut diatas, masalah yang dihadapi dari Dinas Sosial juga terkait mengenai belum tersedianya penetapan lokasi bagi kantor Dinas Sosial karena saat ini kantor Dinas Sosial baru pindah dan bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini juga memberikan pengaruh bagi pelayanan Dinas Sosial dalam membantu para penyandang Disabilitas khususnya dalam hal aksesibilitas.

Penyandang Disabilitas saat ini masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan kesejahteraan, dilihat dari masih sulitnya aksesibilitas dalam memperoleh kesempatan yang sama dan ketersediaan fasilitas khusus bagi penyandang Disabilitas yang masih terbilang minim serta belum tersedianya rehabilitasi yang memadai yang menjamin pelayanan kesehatan bagi para penyandang Disabilitas.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Peran pemerintah khususnya Dinas Sosial mencangkup aksesibilitas terhadap suatu objek pelayanan selalu mengutamakan penyandang Disabilitas. Akan tetapi terkait pelayanan yang ada di Dinas Sosial yaitu masih sulit akses pelayanan dalam memperoleh kesempatan yang sama dan kesediaan fasilitas khusus penyandang Disabilitas yang masih minim.
2. Peran Dinas Sosial mencangkup kesamaan kesempatan dengan memberikan program pelatihan keterampilan yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing penyandang untuk mempunyai keahlian agar dapat meningkatkan usaha ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan Disabilitas dan tetap memonitoring penyandang Disabilitas yang sudah diberikan pelatihan. Tetapi dalam pemberian pelatihan keterampilan Dinas Sosial juga memberikan batasan jumlah bantuan bagi para penyandang Disabilitas seperti adanya keterbatasan jumlah yang tidak sebanding dengan jumlah sebenarnya yang akan diberikan bantuan berupa pelatihan keterampilan bagi para penyandang Disabilitas serta kurangnya anggaran dan kelengkapan data.
3. Peran Dinas Sosial mencangkup rehabilitasi juga membantu para penyandang yang mempunyai penyakit serius serta memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis dan sosial yang maksimal dengan memberikan jaminan kesehatan dalam bentuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan memberikan alat bantu berjalan dalam pemulihan keadaan agar secara psikologis penyandang Disabilitas bisa mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat tetapi Dinas Sosial Kota Balikpapan belum tersedianya rehabilitasi yang memadai dalam pemberian jaminan kesehatan serta alat bantu berjalan yang merata.
4. Peran Dinas Sosial mencangkup bantuan sosial juga memberikan bantuan dalam bentuk dana dan sembako kepada penyandang Disabilitas tiap bulan secara berkelanjutan agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya tetapi keterbatasan anggaran yang ada sehingga pemberian dana disesuaikan dengan anggaran yang ada.

Saran

1. Sebaiknya pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kota Balikpapan lebih memperhatikan lagi permasalahan kesejahteraan bagi penyandang Disabilitas agar semua bisa terlayani dengan baik serta perlu meningkatkan pelayanan supaya lebih baik secara kuantitas dan kualitasnya.
2. Seharusnya Dinas Sosial menambah jumlah penyandang Disabilitas yang akan diberi bantuan pelatihan keterampilan dan menambah anggaran serta melengkapi data. Serta Dinas Sosial perlu meningkatkan anggaran untuk bisa

mengcover lebih banyak masalah yang dihadapi oleh para penyandang Disabilitas sehingga program-program ini menjadi lebih efektif tidak hanya jumlah Disabilitasnya saja tetapi juga kualitas pembinaan.

3. Sebaiknya pihak pemerintah yang memberikan bantuan jaminan kesehatan khususnya bagi para penyandang Disabilitas sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan para penyandang Disabilitas khususnya di bidang kesehatan dengan menyediakan rehabilitasi yang memadai dalam pemberian jaminan kesehatan serta peran Dinas Sosial menghimbau dan bekerjasama dengan perusahaan atau instansi dalam memberikan alat bantu berjalan yang merata dalam pemulihan keadaan agar secara psikologis penyandang Disabilitas bisa mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat.
4. Sebaiknya peran Dinas Sosial dalam pemberian dana dapat meningkatkan anggaran yang ada sehingga pemberian dana bisa menambah jumlah penerimanya untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang Disabilitas guna mendukung pembangunan berkelanjutan yang ada di Kota Balikpapan.

Daftar Pustaka

- Alexander. 1994. *Pengertian Pembangunan (development)*, Jakarta: Pustaka Setia.
- Badrudin. 2012. *Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta.
- Bryant dan Whhite dalam Amira. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Poerwadarminta. 1995. *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rhienak Cipta.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Rafika Aditama.
- Tondaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Kesejahteraan Masyarakat*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Dokumen:

- Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas* Nomor 8 Tahun 2016.